

Politik Perlawanan Masyarakat Menolak Kapal Isap Produksi (Kip) : Studi Mobilisasi Sumberdaya Pada Masyarakat Nelayan Pesisir Di Desa Pusuk, Kab Bangka Barat

Muhammad Abil Sedah Ismail

Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bangka Belitung

ARTICLE INFO

Article history:

Received Agustus, 2025

Revised Agustus, 2025

Accepted Agustus, 2025

Available online Agustus, 2025

ismailsedah25@gmail.com

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

ABSTRAK

Perkembangan Gerakan sosial (Sosial movement), khususnya Politik perlawanan telah membawa perubahan signifikan dalam gerakan sosial. Masyarakat semakin mencoba menciptakan gerakan perlawanan dengan cara dan strategi yang relevan untuk mendorong suatu perubahan sosial politik dan ekonomi masyarakat. Gerakan politik perlawanan adalah salah satu bentuk gerakan sosial yang bertujuan untuk mendorong perubahan sosial atau politik dalam masyarakat. Politik perlawanan merupakan cara atau strategi perlawanan suatu kelompok masyarakat yang tereksplotasi oleh kebijakan pemerintah. Dengan cara menentang narasi dan struktur kekuasaan yang dominan melalui representasi diri, narasi tandingan, mengadvokasikan perubahan sosial politik, ekonomi serta membela hak asasi manusia dan mobilisasi massa. Politik perlawanan dapat bervariasi dalam bentuk dan tujuan namun secara umum bertujuan untuk mendorong perubahan yang dianggap positif dan adil.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji politik perlawanan masyarakat nelayan pesisir Desa Pusuk, Bangka Barat, terhadap aktivitas Kapal

Isap Produksi (KIP) PT. Timah di perairan Teluk Kelabat Dalam. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teori mobilisasi sumber daya McCarthy untuk menganalisis strategi, tantangan, dan hambatan gerakan nelayan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlawanan masyarakat dilakukan melalui konsolidasi forum nelayan, aksi protes, dan advokasi politik, termasuk mendorong perwakilan nelayan menjadi calon legislatif. Gerakan ini muncul sebagai respons atas ancaman kerusakan ekosistem laut dan ketidakpastian perlindungan pemerintah terhadap hak lingkungan hidup nelayan. Politik perlawanan nelayan tidak hanya bertujuan mempertahankan wilayah tangkap, tetapi juga mendorong perubahan kebijakan melalui jalur parlemen demi keberlanjutan sosial-ekologis masyarakat pesisir.

Kata Kunci: Gerakan Politik; Masyarakat Nelayan; Resistensi

ABSTRACT

The development of social movements, particularly resistance politics, has brought significant changes in social movements. Communities are increasingly trying to create resistance movements with relevant strategies to drive social, political, and economic change. Resistance politics is a form of social movement that aims to drive social or political change in society. Resistance politics is a way or strategy of resistance by a group of people who are exploited by government policies. By opposing dominant narratives and power structures through self-representation, counter-narratives, advocating for social, political, and economic change, and defending human rights and mass mobilization. Resistance politics can vary in form and purpose, but generally aims to drive positive and fair change. This study aims to examine the resistance politics of coastal fishermen in Pusuk Village, West Bangka, against the activities of Production

*Corresponding author

E-mail addresses: ismailsedah25@gmail.com



Suction Vessels (KIP) by PT. Timah in the waters of Teluk Kelabat Dalam. This study uses a descriptive qualitative approach with McCarthy's resource mobilization theory to analyze the strategies, challenges, and obstacles of the fishermen's movement. The results show that the resistance of the community is carried out through consolidation of fishermen's forums, protest actions, and political advocacy, including encouraging fishermen's representatives to become legislative candidates. This movement emerges as a response to the threat of damage to marine ecosystems and the uncertainty of government protection of fishermen's environmental rights. The resistance politics of fishermen not only aims to maintain fishing grounds but also drives policy change through parliamentary channels for the socio-ecological sustainability of coastal communities.

Keywords: Political Movement; Fishermen Community; Resistance

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara dengan wilayah maritim terbesar. Deklarasi Juanda 1957 menetapkan perairan teritorial Indonesia sebagai wilayah yang terhubung antar pulau tanpa memandang luasnya (Silalahi, 2023). Masyarakat pesisir memiliki karakteristik khusus dan tinggal di perbatasan daratan-perairan (Fajrie, 2017). Kekayaan laut yang melimpah memicu perebutan akses, seperti konflik antara nelayan dan perusahaan capital.

Nelayan Pusuk di Bangka menjaga laut secara ekosentris, menolak praktik antroposentrisme yang mengeksploitasi alam (Sulaeman, 2021). Mereka menganggap laut sangat penting bagi kelangsungan hidup (Pinto, 2015). Masuknya wacana penambangan Kapal Isap Produksi (KIP) di Teluk Kelabat Dalam menimbulkan kekhawatiran akan kerusakan ekosistem dan berkurangnya hasil tangkapan bernilai tinggi. KIP adalah unit PT. Timah yang mengeruk dasar laut dengan cutter lalu memproses material tambang (Candra, 2017), yang berpotensi merusak ekosistem dan mata pencaharian nelayan.

Nelayan Pusuk melakukan penolakan melalui konsolidasi massa, spanduk, dan penjagaan wilayah. Meski wilayah mereka masuk dalam konsesi PT. Timah, Perda No. 03 Tahun 2020 menyatakan Laut Pusuk sebagai zona bebas tambang. Namun, praktik penguasaan wilayah tetap terjadi, menunjukkan ketimpangan kekuasaan (Irwandi, 2017). Teluk Kelabat Dalam bukan zona tambang, tapi dikuasai industri kapital, memicu ketegangan struktural akibat perbedaan power antara masyarakat dan pemerintah (Wahyuni, 2018).

Perlawanan politik dilakukan melalui FNPTKD yang beranggotakan nelayan dari 10 desa. Konsolidasi ini bertujuan menghentikan KIP dan tambang lainnya, baik melalui litigasi maupun non-litigasi, serta mendorong ketua forum maju sebagai caleg demi kepentingan nelayan. Politik dipandang sebagai alat mempercepat pemulihan ekosistem dan menghapus diskriminasi (Puryono, 2019).

Gerakan ini muncul karena pemerintah tidak pasti dalam membatalkan izin KIP, bahkan memberi kesan menunda. Relasi kuasa antara pemerintah, aparat, perusahaan, dan modal memperkuat keberlangsungan tambang, didukung regulasi seperti UU Omnibuslaw dan UU Minerba. KIP menormalisasikan orientasi ekonomi timah, memicu kemarahan nelayan dan lahirnya gerakan politik perlawanan sebagai bentuk resistensi untuk melindungi laut. Penelitian ini menggali nilai dasar politik perlawanan nelayan Pusuk dalam menolak KIP dan menjaga kelestarian laut di Desa Pusuk, Kabupaten Bangka Barat.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini memiliki dua fokus utama, yaitu mendeskripsikan upaya gerakan politik perlawanan nelayan Pusuk dalam menghadapi eksploitasi laut di Desa Pusuk, serta menganalisis tantangan dan hambatan yang dihadapi Forum



Nelayan Pecinta Teluk Kelabat Dalam (FNPTKD) dalam memperjuangkan kepentingan nelayan.

TINJAUAN PUSTAKA

Kerangka Teoritis

Penelitian ini mengacu pada gagasan McCarthy dan Zald (1997) mengenai strategi dan taktik mobilisasi sumber daya untuk memahami interaksi antara gerakan sosial dan otoritas. McCarthy dan Zald (dalam Opp, 2009) menjelaskan bahwa gerakan sosial memiliki tujuan tertentu dan memanfaatkan strategi yang melibatkan sumber daya fisik, manusia, serta konteks politik-sosial. Mobilisasi ini mencakup lima kategori utama: (1) Moral Resources – legitimasi, dukungan, solidaritas, dan simpati publik sebagai fondasi moral gerakan (Edward dan McCarthy dalam Situmorang, 2007); (2) Cultural Resources – produk budaya seperti musik, media, dan film untuk perekrutan, sosialisasi, dan pembentukan identitas gerakan (Maarif, 2010); (3) Social Organizational Resources – infrastruktur, jaringan sosial, dan organisasi yang memperkuat struktur dan operasional gerakan (Manalu, 2009); (4) Human Resources – aktor, keterampilan, dan pengalaman yang menjadi aset utama keberhasilan gerakan (Singh, 2010); serta (5) Material Resources – modal finansial, fasilitas, dan aset fisik yang memastikan keberlanjutan dan daya saing gerakan (Triwibowo, 2006).

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menekankan pendalaman data melalui uraian deskriptif mulai dari pengumpulan hingga penafsiran dan pelaporan hasil (Ibrahim, 2015: 52). Pendekatan yang digunakan adalah Analisis Deskriptif, yang menurut Bailey dalam Mukhtar (2013: 11) tidak hanya membahas fenomena sosial umum tetapi juga mendeskripsikan aspek spesifik dari sudut “kemengapaan” dan “kebagaimanaan”, baik perilaku yang tampak maupun tersembunyi, sehingga relevan untuk menelusuri genealogi gerakan nelayan Desa Pusuk menolak aktivitas Kapal Isap Produksi (KIP). Lokasi penelitian berada di Desa Pusuk, Kabupaten Bangka Barat, dipilih karena strategis dan memiliki kelompok nelayan yang solid dalam mempertahankan wilayahnya. Data yang digunakan terdiri dari data primer (wawancara mendalam dengan dinas lingkungan hidup dan masyarakat terkait perjuangan nelayan) dan data sekunder (dokumen, buku, jurnal, skripsi, internet, dan koran). Subjek penelitian mencakup Pemerintah Desa Pusuk, kelompok nelayan, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta Dinas Lingkungan Hidup, yang ditentukan dengan teknik purposive sampling berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan mereka terhadap isu. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara (Nawawi dalam Rahman & Ibrahim, 2009: 43), observasi langsung di lapangan (Rahman & Ibrahim, 2009: 43), dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data dalam bentuk narasi, tabel, dan grafik, serta penarikan kesimpulan yang diverifikasi untuk memastikan validitasnya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Program Desa Devisa

Program desa devisa merupakan salah satu program inisiatif pemerintah untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengembangan ekonomi lokal. Program ini dibawa oleh Pemerintah Provinsi bersama dengan Lembaga Pengelola Ekspor Indonesia (LPEI) dengan tujuan untuk mengoptimalkan potensi desa dan meningkatkan pendapatan Negara melalui ekspor. Desa Sidomulyo terpilih menjadi Desa Devisa karena berhasilnya swasta lokal desa

*Corresponding author

E-mail addresses: ismailsedah25@gmail.com



melakukan ekspor kopi, yang menunjukkan adanya potensi besar di desa ini. Pemerintah Desa melihat adanya potensi ini dan ingin memanfaatkannya secara optimal. Oleh karena itu, untuk membantu pemanfaatan potensi ini, Pemerintah Desa kemudian menjadikan program desa devisa sebagai bagian dari program Pemerintah Desa Sidomulyo. Kegiatan utama yang ada dalam program Desa Devisa adalah ekspor. Desa Sidomulyo memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan, namun potensi yang sudah siap untuk diekspor masih terbatas pada kopi. Pernyataan ini disampaikan oleh Mas Dhori selaku manager dari ketakasi.

Upaya Gerakan Politik Perlawanan Kelompok Nelayan Pusuk Menghadapi Eksploitasi Laut

Gerakan perlawanan FNPTKD (Forum Nelayan Pecinta Teluk Kelabat Dalam) melibatkan 10 desa pesisir untuk menolak Kapal Isap Produksi (KIP) dan aktivitas tambang laut di Teluk Kelabat Dalam. Selama hampir 10 tahun, perjuangan dilakukan melalui jalur litigasi dan non-litigasi, serta strategi politik dengan mendorong ketua forum maju sebagai caleg 2024.

Mengacu pada teori mobilisasi sumber daya McCarthy & Zald, FNPTKD memanfaatkan:

1. Sumber daya moral: legitimasi dari pelanggaran prosedur, penolakan kompensasi, serta nilai keadilan dan kepedulian lingkungan.
2. Sumber daya material: perlindungan laut sebagai modal ekonomi utama nelayan.
3. Sumber daya manusia: kepemimpinan lokal dan dukungan masyarakat pesisir.
4. Sumber daya sosial-organisasi: jaringan solidaritas antar desa dan aktor eksternal.
5. Sumber daya budaya: komitmen kolektif menolak kompensasi demi menjaga identitas komunitas.

Maryono, ketua FNPTKD, menegaskan:

"Bisa dibilang iya karena saya dari awal membersamai perlawanan... Amdal tidak ada dan tidak mengikuti prosedur..." (Wawancara, Rabu Juli 2024)

Komitmen ini juga tercermin pada konsistensi menolak kompensasi dari PT. Timah meski desa lain menerimanya. Maryono menyatakan:

"...kalo tidak mengambil itu tidak rugi karena bagi kami nelayan kami sudah komitmen..." (Wawancara, Rabu Juli 2024)

FNPTKD mengawal Perda No. 3/2020 dan RZWP3K yang menetapkan Teluk Kelabat Dalam sebagai wilayah zero tambang, meskipun terdapat celah hukum yang membuat KIP masih beroperasi. Kepala Desa Pusuk menegaskan:

"Tidak setuju... KIP bisa merusak laut kita... teluk kelabat dalam juga masuk zona zero tambang." (Wawancara, Rabu Juli 2024)

Dorongan pencalonan politik Maryono berbasis konsensus menjadi strategi memperjuangkan aspirasi nelayan hingga tingkat provinsi dan pusat:

"...karena kita masyarakat pesisir, kalo ada tuntutan dari gerakan kita sayang juga kalo tidak ada dewan yang mau memperjuangkan..." (Wawancara, Rabu Juli 2024)

Prioritas politik FNPTKD murni untuk kepentingan nelayan tanpa money politics, menghasilkan ± 300 suara:

"...Cuma kita kalahnya sama orang yang politik uang." (Wawancara, Rabu Juli 2024)

Secara keseluruhan, gerakan ini menunjukkan bahwa perlawanan nelayan Pusuk bersifat strategis, berbasis solidaritas, dan memanfaatkan sumber daya secara efektif untuk mempertahankan kelestarian laut serta hak hidup masyarakat pesisir.

Tantangan dan Hambatan Gerakan Politik Perlawanan FNPTKD dalam Membawa Kepentingan Nelayan

Gerakan politik perlawanan Forum Nelayan Pecinta Teluk Kelabat Dalam (FNPTKD) dalam memperjuangkan kepentingan nelayan menghadapi empat hambatan utama, yakni praktik money



politik, keterlibatan aparat penegak hukum (APH), tumpang tindih peraturan RZWP3K, serta penguasaan IUP di wilayah Pusuk.

Money Politik

Praktik money politik menjadi hambatan signifikan dalam pencalonan Ketua FNPTKD pada Pemilu Legislatif 2024. Lawan politik menggunakan strategi pembelian suara masyarakat dengan nominal bervariasi antara Rp100.000–Rp300.000. Sementara itu, Ketua FNPTKD hanya membagikan 1.000 kaos kampanye, sehingga peluang memperoleh suara relatif kecil, khususnya di luar Desa Pusuk.

“yang menerapkan money politik tantangan itu yang paling berat. Saya kemarin mencetak baju sebanyak 1000... masyarakat kita itu di beli dengan nilai variasi ada yang 300rb,200rb,100rb... kita hanya menyiapkan baju” (Wawancara, Rabu Juli 2024)

Fenomena ini menunjukkan bahwa kekuatan politik berbasis moral dan visi perjuangan sulit bersaing dengan strategi pragmatis yang mengandalkan distribusi materi.

Keterlibatan Aparat Penegak Hukum (APH)

APH diduga terlibat dalam melindungi operasi pertambangan Kapal Isap Produksi (KIP) di wilayah Teluk Kelabat Dalam, meskipun aktivitas tersebut melanggar aturan, termasuk ketiadaan AMDAL dan pelanggaran terhadap ketentuan wilayah zero tambang dalam RZWP3K.

“Dan disitu banyak yang bermain APH juga bermain ‘ini punya siapa, punya korem’... orang berebut tulang TNI dan polri itu berkelahi” (Wawancara, Rabu Juli 2024)

Keterlibatan ini mengindikasikan adanya penyimpangan fungsi institusi penegak hukum yang seharusnya melindungi masyarakat, namun justru ikut serta dalam praktik yang merugikan lingkungan dan nelayan.

Tumpang Tindih Peraturan RZWP3K dan Dinamika Perizinan

Pasal peralihan dalam RZWP3K memungkinkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang masih berlaku hingga 2025 untuk diperpanjang, berpotensi membuat status zero tambang baru tercapai pada 2035. Kondisi ini menimbulkan persepsi bahwa kebijakan lebih berpihak pada kepentingan perusahaan dibandingkan masyarakat pesisir.

“Menurut saya ada satu yang harus di rubah itu di pasal peralihan rzwp3k...” (Wawancara, Rabu Juli 2024)

Pandangan ini diperkuat oleh pernyataan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menyebut adanya perbedaan signifikan antara aturan lama dan baru, sehingga menimbulkan potensi konflik.

“...memang harus mengikuti aturan terbaru... sebelum itu harus sosialisasi dulu dengan masyarakat...” (Wawancara, Rabu Mei 2025)

Penguasaan IUP di Laut Pusuk

Penguasaan IUP di wilayah Pusuk telah berlangsung sebelum terbitnya Perda RZWP3K yang menetapkan kawasan tersebut sebagai wilayah zero tambang. Hal ini memicu konflik antara nelayan dan penambang. Upaya perlawanan dilakukan melalui pemasangan spanduk penolakan, pematokan batas wilayah melaut, hingga mobilisasi nelayan untuk konsolidasi gerakan. Dari proses ini, terbentuk FNPTKD sebagai wadah perjuangan kolektif nelayan Teluk Kelabat Dalam.

“Selama ini nelayan di teluk kelabat mayoritas adalah nelayan... padahal sudah jelas tidak boleh di tambang...” (Wawancara, Rabu Juli 2024)

Perjuangan Berbasis Elektoral Berdasarkan Mobilisasi Sumber Daya McCarthy: Analisis Teori

Perjuangan nelayan Pusuk yang tergabung dalam Forum Nelayan Pecinta Teluk Kelabat Dalam (FNPTKD) merupakan bentuk strategi politik untuk mempercepat tercapainya kepentingan kolektif,



khususnya dalam menghadapi kebijakan yang bersifat eksploitatif terhadap sumber daya laut. Analisis ini menggunakan teori mobilisasi sumber daya McCarthy dan Zald yang menekankan lima komponen utama: sumber daya moral, budaya, organisasi sosial, manusia, dan material.

Sumber Daya Moral

Nilai moral menjadi landasan utama perjuangan FNPTKD. Penolakan terhadap Kapal Isap Produksi (KIP) berangkat dari keyakinan bahwa laut adalah investasi jangka panjang untuk keberlanjutan hidup generasi mendatang. Masyarakat menilai ekosistem Teluk Kelabat Dalam memiliki nilai biotik (ikan, kerang, lobster, kepiting) dan abiotik (air, tanah, udara, cahaya, suhu, kelembapan) yang harus dilindungi. Aktivitas KIP dianggap merusak kedua komponen tersebut, memengaruhi iklim, dan menurunkan hasil panen laut maupun pertanian, terbukti dengan banjir dan gagal panen di Desa Pusuk sejak 2018.

Sumber Daya Budaya

Budaya lokal menjadi penguat konsistensi perlawanan. Tradisi Taber Laut, sebagai wujud penghormatan pada leluhur dan laut, memperkuat kesadaran ekologis masyarakat. Mayoritas penduduk yang beragama Islam menjadikan nilai religius turut melekat dalam budaya ini, sehingga penolakan terhadap KIP juga dimaknai sebagai bagian dari menjaga amanah budaya dan keyakinan.

Sumber Daya Organisasi Sosial

FNPTKD berfungsi sebagai wadah koordinasi antar-nelayan dari berbagai desa di Teluk Kelabat Dalam. Organisasi ini dibentuk untuk menjaga solidaritas dan komitmen kolektif dalam menolak pertambangan laut. Dengan visi melindungi laut dari KIP, FNPTKD menjadi instrumen strategis untuk menyatukan aspirasi masyarakat pesisir.

Sumber Daya Manusia

Kekuatan manusia tercermin dari tingkat partisipasi masyarakat. Solidaritas tinggi terlihat dalam aksi massa hingga dukungan elektoral terhadap Ketua FNPTKD pada Pileg 2024. Di Desa Pusuk, perolehan suara Ketua FNPTKD unggul dibandingkan caleg lain, meskipun secara keseluruhan kalah akibat praktik money politik di luar desa.

Sumber Daya Material

Perjuangan juga melibatkan perlindungan sumber daya alam, termasuk terumbu karang, hutan mangrove, ikan selangit, kepiting rajungan, lobster, dan kerang bambu. Nelayan memandang keberagaman hayati ini sebagai aset vital yang menopang ekonomi dan kehidupan mereka, sehingga rusaknya akan berdampak langsung pada hasil tangkapan dan kesejahteraan jangka panjang.

Secara keseluruhan, mobilisasi massa FNPTKD dapat dipahami sebagai proses integratif yang memanfaatkan berbagai bentuk sumber daya demi mencapai tujuan perlindungan lingkungan dan penguatan posisi sosial-ekonomi nelayan. Strategi berbasis elektoral dipandang sebagai langkah penting untuk mendorong perubahan kebijakan dari dalam sistem politik.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Gerakan politik perlawanan nelayan Pusuk melalui FNPTKD adalah respon kolektif terhadap eksploitasi laut di Teluk Kelabat Dalam. Perlawanan ini memanfaatkan pengetahuan lokal, nilai budaya, dan jaringan organisasi untuk melindungi hak nelayan dan kelestarian lingkungan. Strategi elektoral dengan mengusung kandidat pro-nelayan bertujuan mempengaruhi kebijakan publik.

Meski demikian, perjuangan menghadapi tantangan serius: politik uang, keterlibatan aparat yang berseberangan kepentingan, tumpang tindih kebijakan (RZWP3K), dan dominasi IUP pertambangan di laut Pusuk. FNPTKD perlu memperkuat strategi, transparansi, dan kesadaran



politik masyarakat agar kepentingan nelayan tetap menjadi prioritas dalam proses pengambilan kebijakan.

Saran

- a. Peneliti — Melakukan riset lanjutan terkait konsistensi gerakan perlawanan politik dalam menolak KIP demi kelestarian laut.
- b. Masyarakat & Ketua FNPTKD — Menjadikan hasil penelitian ini sebagai referensi dan pengingat agar tujuan forum tetap terjaga meski telah meraih posisi politik.
- c. Pemerintah — Menggunakan temuan ini sebagai evaluasi kebijakan, dengan memastikan keterlibatan masyarakat terdampak dan menghindari kebijakan yang bersifat eksploitatif.

5. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Edwards B & McCarthy. 2004. Resource and Mobilization: The Blackwell Companion to Social Movements. Massachusetts: Blackwell Publishing

Haris, Andi. 2019. Mengenal Gerakan Sosial dalam Perspektif Ilmu Sosial.

Manalu, Dimpos. 2009. Gerakan Sosial dan Perubahan Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gajah Mada University Press

Mukhtar. 2013. Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif. Jakarta: Referensi (GP Press Group)

Opp, Karl Dieter. 2009. Theories of Political Protest and Social Movements: a Multidiciplinary Introduction, Critique, and Synthesis. London: Routledge

Rahman, Bustami dan Ibrahim, 2009. Menyusun Proposal Penelitian. Pangkalpinang: UBB Presss.

Singh, Rajendra. 2010. Gerakan Sosial Baru. Yogyakarta: Resist Book

McCharthy, John D dan Mayer N Zald. 1997. Resource Mobilization And Social Movements: A Partial Theory. The American Jurnal Of Sociology Volume 82, Issue 6: 1212-1241

Jurnal

Candra, Arjuna. 2017. Analisis Kinerja Pompa Tanah Agar Sesuai Dengan Kapasitas Feed Yang Dibutuhkan Jig Primer Pada Kapal Isap Produksi 17 di Laut Cupat Luar, Unit Penambangan Laut Bangka PT. Timah (Persero), Tbk. Jurnal Pertambangan, Volume 1, Nomor 4, 2017

Fajrie, Mahfudlah. 2017. Gaya Komunikasi Masyarakat Pesisir Wedung Jawa Tengah. INJECT: Interdisciplinary Journal of Communication, Volume 2, Nomor 1, Juni 2017

Hafiz, Ahmad Subhan. 2022. Gerakan Sosial Berbasis Adat (Studi Pada Resistensi Masyarakat Simpang Teritip Terhadap Hutan Tanaman Industri di Bangka Barat). Bangka Belitung: Universitas Bangka Belitung

Hapsari, Dwi Retno. 2020. Gerakan Sosial Nelayan di Sumatera Barat: Isu, Aktor Dan Taktik Gerakan. Jurnal Sosiologi Pedesaan, Volume 8, Nomor 1, 2020

Hasanuddin Journal Of Sociology (HJS), Volume 1, Issue 1, 2019 Ibrahim. 2015. Metode penelitian

*Corresponding author

E-mail addresses: ismailsedah25@gmail.com



Kualitatif. Bandung: Alfabeta.

Irwandi. 2017. Analisis Konflik Antara Masyarakat, Pemerintah Dan Swasta (Studi Kasus Di Dusun Sungai Samak, Desa Sungai Samak, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung). JISPO, Volume 7, Nomor 2, Desember 2017

Jacobus, Chrismax Fernando. 2023. Kelompok Nelayan Kinamang Di Kelurahan Malalayang Dua Kecamatan Malalayang Kota Manado. Jurnal Holistik, Volume 16, Nomor 2, Juni 2023

Maarif, Syamsul. 2010. Perilaku Kolektif dan Gerakan Sosial. Yogyakarta: Gress Publishing.

McCarthy, John D dan Mayer N Zald. 1997. Resource Mobilization And Social Movements: A Partial Theory. The American Journal Of Sociology Volume 82, Issue 6: 1212-1241

Pamungkas, Kurnia Putra. 2016. Resistensi Masyarakat Terhadap Pemerintah Daerah (studi kasus di Desa Wisata Sembungan, Kec. Kejajar, Kab. Wonosobo). Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Pinto, Zulmiro. 2015. Kajian Perilaku Masyarakat Pesisir Yang Mengakibatkan Kerusakan Lingkungan (Studi Kasus di Pantai Kuwaru, Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul, Provinsi DIY). Jurnal Wilayah Dan Lingkungan, Volume 3, Nomor 3, Desember 2015

Silalahi, Dwi Grace Rosalia. 2023. Analisis Perkembangan Batas Laut Indonesia di Wilayah Perairan Indonesia, Menurut Hukum Laut Indonesia maupun Hukum Laut Internasional. Jurnal Hukum Indonesia, Volume 2, Nomor 2, April 2023

Sulaeman, Oton. 2021. Polemik Antara Antroposentrisme Dan Ekosentrisme Dalam Perspektif Filsafat Mulla Sadra. Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora, Volume 19, Nomor 2, 2021

Wahyuni. 2018. Identifikasi Pola Psikologi Komunikasi Resisten. Jurnal Peurawi, Vol. 1 No. 1 Tahun 2018

Windasai. 2021. Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan (Studi Kasus Kepulauan Masalembu Kabupaten Sumenep). Jurnal Inovasi Penelitian, Volume 2, Nomor 3, 2021

Internet

Maarif, Syamsul. 2010. Perilaku Kolektif dan Gerakan Sosial. Yogyakarta: Gress Publishing.

Puryono, Sri. 2019. Pengelolaan Pesisir Dan Laut Berbasis Ekosistem. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang

Situmorang, Abdul Wahib. 2007. Gerakan Sosial: Studi Kasus Beberapa Perlawanan. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Triwibowo, Darmawan. 2006. Gerakan Sosial: Wahana Civil Society Bagi Demokratisasi. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia

Ghufron, Richard. 2018. Resistensi Buruh Terhadap Peraturan Pemerintahan Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan. Malang: Universitas Brawijaya

Pamungkas, Kurnia Putra. 2016. Resistensi Masyarakat Terhadap Pemereintahan Daerah (Studi



Di Desa Wisata Sembungan, Kec. Kejajar, Kab. Wonosobo)